

**Implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2021 Tentang
Penyelenggaraan Program Jaminana Kehilangan Pekerjaan Di Kabupaten
Majalengka**

Disusun Oleh :

YUNI AGUSTIANA

E1A018018

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi pada tahun 2020 melalui UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja diadakan perluasan program jaminan sosial yang manfaatnya dapat dirasakan secara khusus bagi pekerja yang kehilangan pekerjaan akibat mengalami pemutusan hubungan kerja (PHK). Bentuk perluasan tersebut adalah menambahkan program jaminan kehilangan pekerjaan (JKP) ke dalam sistem jaminan sosial nasional. Penelitian ini bertujuan mengetahui implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan program Jaminan Kehilangan Pekerjaan serta mengetahui kendala dan upaya dalam penyelenggaraan program jaminan kehilangan pekerjaan di Kabupaten Majalengka. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan spesifikasi penelitian deskriptif. Data yang digunakan adalah data sekunder bersumber pada studi kepustakaan dan peraturan perundang-undangan. Data diolah dan dianalisis dengan metode normative kualitatif. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa Implementasi Peraturan Pemerintah No 37 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kehilangan pekerjaan di Kabupaten Majalengka belum terlaksana dengan baik karena masih ada beberapa perusahaan yang belum mendaftarkan pekerja/buruhnya ke dalam program BPJS. Belum optimalnya program tersebut diakibatkan kendala-kendala yang muncul diantaranya kendala Intern dan ekstern.

Kata Kunci : Kebijakan, Jaminan Sosial , Ketenagakerjaan.

***Implementation of Government Regulation Number 37 of 2021 concerning the
Implementation of the Job Loss Guarantee Program in Majalengka Regency***

By:

Yuni Agustiana

E1A018018

ABSTRACT

This research was motivated in 2020 through Law Number 11 of 2020 concerning Job Creation, an expansion of the social security program was held, whose benefits can be felt specifically for workers who have lost their jobs due to termination of employment (LAYOFFS). The form of expansion is to add a job loss insurance program (JKP) to the national social security system. This study aims to determine the implementation of Government Regulation No. 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Insurance program and find out the obstacles and efforts in implementing the job loss guarantee program in Majalengka Regency. The research method used is normative juridical with descriptive research specifications. The data used is secondary data sourced from literature studies and laws and regulations. The data is processed and analyzed by normative qualitative methods. The results showed that the implementation of Government Regulation No. 37 of 2021 concerning the Implementation of the Job Loss Guarantee Program in Majalengka Regency has not been carried out properly because there are still several companies that have not registered their workers/workers into the BPJS program. The lack of optimal program is due to obstacles that arise including internal and external constraints.

Keywords : Policy, Social Security, Employmen